

**PENGARUH KEPATUHAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,  
PEMANFAATAN SIA KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN DAN  
PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar)**

Sella Antika Purboraras

Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Brawijaya  
Malang

e-mail: [sellapurboraras@gmail.com](mailto:sellapurboraras@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pelatihan pegawai, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini meliputi seluruh pegawai pada bagian keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Sampel yang digunakan adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala dan staf bagian keuangan atau akuntansi. Kuesioner dibagikan kepada 75 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS (*Structural Equation Modeling - Partial Least Square*) dengan menggunakan alat bantu program *SmartPLS ver. 2.0 M3*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan pelatihan pegawai memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, pelatihan, pengawasan, kualitas laporan keuangan.

**Abstract**

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of compliance with Government Accounting Standards, utilization of the Regional Financial Accounting Information System, employee training, and supervision of regional finance on the quality of financial statements. This research uses quantitative research methods. Data retrieval was conducted through distribution of questionnaires with a Likert scale. The population of this study includes all employees in the finance department in each Regional Organization (OPD) of Blitar Regency. The sample consisted of the Financial Administration Officer (PPK) as well as the head and staff of the finance or accounting subdivision. Questionnaires were distributed to 75 respondents. The utilized data analysis method is SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Square*) using the *SmartPLS application ver. 2.0 M3*. The results of this study indicated that compliance with Government Accounting Standards, utilization of Region Financial Accounting Information Systems, employee training have a positive influence on the financial quality of statements, while regional finance supervision does not affect the quality of financial statements.

**Keywords :** Government Accounting Standards, Regional Financial Information Systems, training, supervision, quality of financial statements.

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini sistem pemerintahan desentralisasi dinilai efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan tidak hanya berpusat pada pemerintahan pusat namun juga pada pemerintahan daerah. Azlim, Darwani, dan Bakar (2012) mengatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk menciptakan tata kelola yang baik, diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nugraheni, dan Subaweh 2008). Dengan menerapkan otonomi daerah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab adalah dengan membuat laporan keuangan pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan adalah informasi mengenai keuangan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan publik. Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintahan di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu, masih banyak terdapat penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat kelompok utama pengguna laporan pemerintah, namun tidak terbatas pada kelompok utama tersebut saja. Empat kelompok utama tersebut, yaitu: (1) masyarakat; (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; (4) pemerintah.

Dalam mengelola keuangan daerah, suatu daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. Sari (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat

digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Banyak sekali manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Andi, 2003). Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia. Dan agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka dibutuhkan SDM yang berkualitas.

Ketersediaan SDM yang berkualitas diperlukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintahan. SDM merupakan kunci sukses dari suatu organisasi. Hal ini dikarenakan SDM yang menyajikan laporan keuangan tersebut, dan dengan adanya SDM yang berkualitas, maka SDM tersebut telah mengetahui dan memahami penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Dikarenakan prosedur dalam pelaporan keuangan dapat berubah berdasarkan pada peraturan yang berlaku, maka dalam mengetahui perbaruan tersebut para pegawai dapat mengikuti pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian akan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan perlu diadakannya sebuah kegiatan pengawasan. Dikarenakan pengawasan suatu kegiatan digunakan untuk meyakinkan dan menjamin agar kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, ketentuan, dan standar sehingga memudahkan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan preventif, dan pengawasan represif (Arfianti, 2011). Adanya pengawasan sebenarnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Namun pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan intern pemerintah, pengawasan intern pemerintah dapat dilakukan dengan cara pengawasan oleh atasan atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat.

Berdasarkan grafik perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Indonesia tahun 2011 hingga 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun ke tahun, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah mengalami perbaikan. Dapat dilihat dari prosentase opini yang diberikan BPK yaitu WTP mengalami peningkatan, WDP terus menurun dan TMP terus menurun. BPK Perwakilan Jawa Timur pada hari Rabu (31 Mei 2017) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 050/LHP/XVIII.SBY/06/2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Blitar. Pada tahun tersebut Kabupaten Blitar masih pertama kali mendapatkan opini WTP, ditahun sebelumnya Kabupaten Blitar mendapatkan opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Mengingat dengan memperolehnya opini WTP tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten Blitar juga semakin berat, yaitu mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun selanjutnya.

Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan Kabupaten Blitar di tahun 2016 silam mendapatkan predikat WTP untuk pertama kali. Peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Blitar hingga mendapat predikat WTP tersebut, sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat bagi daerah lainnya yang belum mendapat predikat WTP. Opini WTP diberikan apabila sistem pengendalian intern di dalam suatu pemerintahan sudah baik dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Dalam penelitian ini menggunakan teori kepatuhan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut, taat kepada perintah atau peraturan dan disipin Terdapat dua perspektif mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Berdasarkan perspektif normatif maka teori kepatuhan dapat diterapkan di bidang akuntansi, khususnya terkait dengan masalah pelaporan laporan keuangan. Apalagi terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaporan laporan keuangan seperti Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku.

Hipotesis dari penelitian yang akan diuji berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan teori kepatuhan yaitu (1) kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, (3) pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan (4) pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat

kuantitatif atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada OPD Kabupaten Blitar. pengambilan sampel dengan *purposive sampling* karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan kriteria suatu pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2013). Kriteria responden dalam kriteria ini adalah para pegawai yang melakukan fungsi keuangan atau akuntansi dan penatausahaan keuangan pada OPD di Kabupaten Blitar. Dan responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala subbagian keuangan atau akuntansi, dan staf subbagian keuangan atau akuntansi. Setiap OPD ditetapkan sebanyak 3 orang yang menjadi responden. Penentuan tersebut ditetapkan dengan alasan bahwa responden tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pada OPD tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada instansi pemerintah yang terkait. Kuesioner disebarkan ke 28 OPD di Kabupaten Blitar dan setiap OPD akan dibagikan 3 kuesioner. Jadi sumber data didapatkan dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada 84 responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala ini merupakan kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu obyek tertentu. Skala ini umumnya menggunakan lima angka penilaian

Dalam penelitian tidak dilakukan *pilot test*, dikarenakan peneliti menggunakan pernyataan yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah salah satu metode alternative estimasi model untuk mengelola *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. PLS adalah sebuah model pendekatan pemodelan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel *laten criterion* yang dapat dijelaskan (*explained variance*) oleh variabel *laten predictor*. SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan SEM-PLS karena penelitian bersifat eksplanatoris atau perluasan teori yang sudah ada. Pertimbangan lainnya adalah karena model penelitian yang diteliti mempunyai konstruk second order dengan konstruk first order sebagai indikatornya. Pengujian penelitian ini menggunakan alat bantu program SmartPLS ver. 2.0 M3.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini, responden yang dipilih merupakan pegawai yang melakukan fungsi keuangan / akuntansi dan penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar. Kuesioner penelitian ini disebarkan secara *offline* dengan cara memberikan langsung kepada responden yang bersangkutan. Jumlah kuesioner yang diberikan pada tiap OPD terdapat 3 kuesioner dan dibagi ke 28 OPD, jadi

kuesioner yang disebar sebanyak 84 kuesioner. Peneliti melakukan pengumpulan data kurang lebih dua minggu hingga terkumpulnya data. Sebelum menyebarkan kuesioner, peneliti meminta surat ijin penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Blitar dan mengirimkan surat ijin tersebut kepada seluruh OPD di Kabupaten Blitar. Kemudian peneliti menunggu 2 hari apakah masing-masing dinas mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian disana.

Kuesioner yang kembali sebanyak 75 kuesioner dan yang tidak kembali sebanyak 9 kuesioner. Karakteristik responden penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, masa bekerja, dan pendidikan terakhir. Karakteristik jenis kelamin responden didominasi oleh wanita yaitu sejumlah 41 (54,7%). Karakteristik usia didominasi responden yang berusia 31-40 tahun yaitu sejumlah 35 (46,6%). Karakteristik masa bekerja didominasi oleh pegawai yang memiliki masa kerja 11-15 tahun yaitu sejumlah 27 (36%). Dan karakteristik pendidikan terakhir didominasi oleh responden berpendidikan terakhir S1 yaitu sejumlah 49 (65,3%).

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yaitu kualitas laporan keuangan daerah, kepatuhan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan system informasi akuntansi daerah, pelatihan pegawai dan pengawasan keuangan daerah. Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pengujian yakni uji *outer model* dan uji *inner model*. Uji *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model yang digunakan oleh peneliti. Dengan mengetahui korelasinya, maka sebuah model dapat diketahui validitas dan reliabilitasnya. Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*. Dalam penelitian ini alias *outer model* dilakukan menggunakan aplikasi *SmartPLS 2.0 M3* dengan hasil *output overview algoritma* yang berupa *quality criteria overview* dan *factor loading (outer loading)*.

Untuk mengukur validitas konvergen pada penelitian ini penulis melakukan dua analisis dengan melihat nilai AVE dan *Communality* untuk mengetahui nilai rata-rata varian yang diekstaksi dan menganalisis nilai *factor loading* untuk mengetahui nilai masing-masing indikator yang dimiliki oleh variabel laten. Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas konvergen penelitian ini adalah nilai AVE dan *Communality* lebih dari 0,5 dan nilai *factor loading* adalah lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa nilai AVE dan *Communality* pada masing-masing variable menunjukkan hasil lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai AVE dan *Communality* telah memenuhi *convergent validity*. Selain melihat nilai AVE dan *Communality*, pengujian validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *factor loading*. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa indikator pada masing-masing variable memiliki nilai *factor loading* lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variable memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga memenuhi *convergent validity*.

Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas diskriminan adalah nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* adalah lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk

masing-masing variabel lebih besar daripada nilai korelasinya sehingga variabel dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Selain itu uji validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading*. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan (*discriminant validity*).

Uji reliabilitas penelitian ini bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. Untuk melakukan pengujian reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua cara yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, pada penelitian ini penulis menggunakan parameter nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,7 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa model menunjukkan nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* untuk semua variabel berada diatas nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

Untuk menguji model struktural dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R-square (R<sup>2</sup>) untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> digunakan untuk mengukur presentase variansi variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa R<sup>2</sup> untuk variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,9847. Hal ini berarti variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pelatihan pegawai, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 98,47% dan sisanya 1,53% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diajukan dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis pada hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. hipotesis pertama menyatakan bahwa kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah maka pegawai harus patuh akan Standar Akuntansi Pemerintah yang ada. Jadi semakin patuh pegawai terhadap Standar Akuntansi Pemerintah maka kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017) dan Andiansyah (2016) juga menyatakan bahwa kepatuhan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis pada hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atas pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah maka pegawai harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi jika pegawai semakin memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah maka kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ida Bagus dkk (2014), semakin tinggi tingkat pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi pula nilai informasi yang dihasilkan. Apabila penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tepat, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Wibawa, Sinarwati, dan Yuniarta (2017) dan Pujiswara, Herawati, dan Sinarwati (2014) juga menyatakan bahwa pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Pelatihan Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis pada hipotesis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atas pelatihan pegawai terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pelatihan pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah maka pegawai harus rutin diberi pelatihan yang sesuai dengan tupoksi (tugas pokok, dan fungsi) atau pekerjaannya, agar dengan adanya pelatihan tersebut, ilmunya sangat bermanfaat bagi pegawai saat melaksanakan tugasnya. Jadi semakin sering dan sesuainya pelatihan pegawai yang dilaksanakan maka kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wungow, Lambey, dan Pontoh (2012), semakin banyak pelatihan yang diikuti pegawai sesuai dengan bidang kerjanya maka akan semakin terampil dan berkualitas pegawai tersebut. Manfaat mengikuti pelatihan adalah agar pegawai terampil, berkualitas dan kompeten dalam bidang pekerjaannya. Pelatihan yang diikuti oleh pegawai terutama pelatihan pada bidang keuangan membuat pegawai paham bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis pada hipotesis ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh atas pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan di Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah belum efektif dan efisien, dalam melakukan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan setiap transaksi sebagian tidak terdapat bukti. Hal ini didasarkan dari indikator operasional yang digunakan dalam variabel ini.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efendi, Darwanis, dan Abdullah (2017) menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat, dipandang menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian opini WTP atas LKPD pada Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan objek atau sampel yang berbeda, dapat menghasilkan output yang berbeda dikarenakan keadaan setiap lingkungan instansi yang berbeda-beda.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan. Faktor-faktor yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, pelatihan pegawai, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden dan memberikan kuisioner menggunakan *skala likert*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala subbagian keuangan atau akuntansi, dan staf subbagian keuangan atau akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan pelatihan pegawai memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya semakin tinggi kepatuhan pegawai atas Standar Akuntansi Pemerintah, semakin tinggi dan semakin baik pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan semakin sering diadakannya pelatihan yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pegawai, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Dan

variabel pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

### **Saran**

Adapun saran yang diambil dari hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam penyebaran kuesioner perlu disertakan batas tanggal pengambilan kuesioner agar tidak menghambat proses pengolahan pada penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait variabel pengawasan keuangan daerah, dikarenakan pada penelitian ini hanya berfokus pada variabel pengawasan keuangan daerah intern. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti pengawasan keuangan daerah yang berfokus pada pengawasan eksternal, preventif ataupun represif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Koman., dkk (2017). “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng.
- Andiansyah, Donny (2016). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung.
- Azlim, Darwanis, Usman, A.B.. (2012). “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1-14.
- Bastian, Indra (2010). “Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga”. Penerbit Erlangga:Jakarta.
- Efendi, Loli., dkk (2017). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. Diakses dari [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/II/ihps\\_ii\\_2016\\_1491461165.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/II/ihps_ii_2016_1491461165.pdf), Januari 2018.
- Komarudin, Yusup. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan”. Bandung.
- Kombong, Reni (2017). “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Hassanudin, Makassar.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh (2008). “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 13(1), 48-58. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/5955-ID-pengaruh-penerapan-standar-akuntansi-pemerintahan-terhadap-kualitas-laporan-keua.pdf>.

- Nurlaila (2014). “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Hassanudin, Makassar.
- Payamta, 2006, “Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi, Dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Bisnis Manajemen*, 6(1), 83.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/57/698.bpkp>
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Diakses dari <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/506/pp-no-65-tahun-2010>
- Pujiswara, I.B., Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014). “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah”, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganeshha*, 2(1). Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2492/2152>
- PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dari <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Diakses dari [http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU\\_13\\_2003.PDF](http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_13_2003.PDF).
- Sekaran, U., 2006. “Research Methods for Business. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis”. Jakarta: Salemba 4.
- Sugiyono (2015). *Statistika untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Wungow, Jhon Fiesgrald., Linda Lambey, dan Winston Pontoh (2012). “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/63613-ID-pengaruh-tingkat-pendidikan-masa-kerja-p.pdf>
- Yosefrinaldi (2013). “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas, Padang.